

STUDIA ADMINISTRASI

RASIONALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) KABUPATEN JAYAPURA

Agus Sofyan¹, Susilawaty², Yuliati Kala'Padang³, Elvira Usulu⁴

¹Program Studi Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Institut Pahlawan 12

^{2,3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas YAPIS Papua
Koresponding E-mail: *agusgober59@yahoo.com*

Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif dalam upaya memberikan gambaran pada tiga hal utama tentang prinsip dasar peningkatan kekayaan aset daerah yakni Adanya perencanaan yang tepat, Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan Pengawasan (monitoring). Dengan instrument pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya Teknik Analisa yang dipilih berdasarkan pada tiga tahapan yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data dari hasil wawancara dengan sejumlah informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan yang tepat dirumuskannya pemetaan aset daerah yang dinyatakan masih minim kontribusinya terhadap capaian PAD, bahkan masih banyak aset yang belum memberikan kontribusi sama sekali terhadap PAD yang dikenal dengan istilah aset mati, sehingga strategi yang tepat dengan dibentuknya tim pemetaan aset tersebut dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah termasuk pihak eksternal dari luar Bappenda Kabupaten Jayapura. Pelaksanaan/Pemanfaatan secara Efisien & Efektif, Strategi ini diterapkan dengan proses pelaksanaan melakukan pendataan atas aset mana yang telah berkontribusi maksimal terhadap PAD, aset mana yang berkontribusi namun masih diluar target dan aset mana yang sejauh ini belum berkontribusi sama sekali terhadap peningkatan PAD Daerah dan pada aspek Pengawasan, adalah proses pemeriksaan serta pemantauan yang profesional sesuai dengan kapasitas dan kewenangan dari para pelaksana tugas tersebut. Proses ini dijalankan dengan strategi yang ditetapkan, dimana unsur pengawas melibatkan pihak eksternal Bappenda untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi dilakukan dengan adanya sejumlah rekomendasi dari hasil pengawasan tersebut untuk dijadikan perhatian dan perbaikan pada pelaksanaan program berikutnya, pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Rasionalisasi, Peningkatan, Pendapatan Asli Daerah

STUDIA ADMINISTRASI

THE RATIONALIZATION OF THE REGIONAL REVENUE IMPROVEMENT AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY (BAPPENDA) OF JAYAPURA REGENCY

Abstract

This descriptive study aims to provide an overview of three key principles for enhancing regional asset management: proper planning, efficient and effective implementation and utilization, and comprehensive supervision (monitoring). Data collection methods included observation, interviews, and documentation, while analysis was conducted through three stages: data reduction, data display, and verification based on interviews with selected informants. The findings reveal that proper planning involves mapping regional assets, many of which have minimal or no contribution to Locally-Generated Revenue (PAD), often referred to as "dead assets". A key strategy is the formation of an asset mapping team that includes regional stakeholders and external parties, particularly from outside the Regional Revenue Agency of Jayapura Regency. For efficient and effective implementation and utilization, the strategy should focus on identifying asset based on the level of the contribution to locally-generated revenue (PAD). In the supervision phase, professional inspections and monitoring are conducted in accordance with the capacity and authority of the task executors. This process involves external stakeholders to ensure transparency and accountability. Periodical monitoring and evaluation are to be conducted upon recommendations from the supervision used to guide improvements in subsequent programs. Supervision is based on stakeholder agreements, ensuring consistent oversight.

Keywords: *Rationalization, Improvement, Locally-Generated Revenue.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan pada sumber pemberitaan media Cetak di Kabupaten Jayapura, Senin (6/7/2020), telah terjadi penurunan yang signifikan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura tahun 2020 dimana terjadi penyusutan sebesar 151 miliar dari total 1,4 triliun. Penyusutan APBD ini lantaran sumber pendapatan daerah yaitu dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU dan DAK dikurangi akibat Pandemi Covid 19. Hingga akhir Desember 2021 lalu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura, Papua mencapai 79 persen atau sebesar Rp 126 miliar dari target pendapatan asli daerah pada APBD-Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp 160 miliar.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, untuk menutupi kebutuhan anggaran ini, seluruh OPD diminta melakukan rasionalisasi mandiri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pun telah menyepakati maksimal 30 persen dari total anggaran yang dikurangi oleh masing-masing OPD. Jadi kalau 54 OPD melakukan mandiri untuk pengembalian 30 persen, itu otomatis tertutup, tapi dalam pelaksanaannya banyak OPD yang merasa banyak kegiatan tidak jalan kalau tidak ada anggaran pembinaan, tapi ini tidak bisa dihindari, Dengan adanya rasionalisasi mandiri ini maka

STUDIA ADMINISTRASI

OPD harus menyusun program sesuai anggaran yang tersisa. Sebab, ini penting agar tak terjadi defisit keuangan.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD, yang salah satunya adalah dari pengoptimalan aset yang dimiliki oleh Kabupaten sehingga dapat berkontribusi secara rasional terhadap peningkatan PAD, yang tentunya menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD atau perangkat teknis yang dibentuk untuk melakukan pemetaan perolehan anggaran sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, baik dari sector pajak maupun pengelolaan aset yang dimilikinya.

Berdasarkan pada fenomena tersebut di atas, maka Bappenda Kabupaten Jayapura sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas khusus dalam mengelola pendapatan daerah serta menjadi perangkat teknis daerah yang harus berkontribusi secara dominan dalam menghadapi permasalahan penurunan pendapatan daerah yang selama ini lebih mengandalkan anggaran pembangunan dari pusat, dituntut agar dapat menentukan langkah rasional dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Jayapura.

Dinamika tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan kajian secara lebih mendalam, sehingga peneliti menetapkan topik kajian yaitu mengenai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya sehingga memberikan gambaran secara obyektif. Dengan dasar penelitian yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam atau *indepth interview*.

Kajian ini memfokuskan diri pada proses rasional dalam mengoptimalkan aset daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dimana menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar peningkatan kekayaan aset daerah yakni:

1. Adanya perencanaan yang tepat,
2. Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan
3. Pengawasan (monitoring).

Penggalan data dan informasi terkait tiga fokus kajian tersebut akan tergambarkan dengan proses wawancara kepada pihak-pihak yang dipandang berkompeten terkait permasalahan tersebut, selanjutnya data dan informasi yang diperoleh dilapangan, akan diolah dengan tahapan mulai dari Reduksi data (*reduction data*), Penyajian data (*data display*) dan pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

STUDIA ADMINISTRASI

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perencanaan yang tepat

Fokus pertama dalam penelitian ini adalah mengenai Perencanaan yang tepat, yaitu menelaah bagaimana proses penyusunan rencana aksi yang mengarah pada pencapaian target dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mencoba menggali data dan informasi dari sejumlah informan, dan dari Sekretaris Badan diperoleh informasi berkaitan dengan proses penyusunan perencanaan dalam upaya penetapan strategi peningkatan pendapatan asli daerah, diperoleh informasi sebagai berikut: *“Secara rasional Penyusunan rencana kerja yang dilakukan Bappenda mengacu pada hasil kajian mengenai potensi apa yang dapat dikembangkan serta mengacu pada capaian tahun sebelumnya dan dituangkan dalam Renstra Badan, dimana strategi yang diterapkan berdasarkan hal tersebut diantaranya adalah optimalisasi penerimaan pajak, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan optimalisasi penanaman saham pada pihak ketiga, rencana tersebut dipandang sangat efektif dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Jayapura saat ini.* (wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di kantor Bappenda Kab.Jayapura)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara juga dengan Kepala Bidang Program pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dan diperoleh informasi sebagai berikut : *“Rencana strategi yang diterapkan dalam upaya peningkatan PAD pada Bappenda salah satunya adalah upaya peningkatan kesadaran wajib pajak karena sejauh ini dipandang kesadaran wajib pajak masih relative rendah sehingga dipandang perlu untuk mengoptimalkannya dengan jalan sosialisasi lebih intens melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik termasuk media social.* (wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di kantor Bappenda Kab.Jayapura)

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dan diperoleh informasi sebagai berikut: *“Salah satu rencana yang efektif dan rasional dalam upaya peningkatan PAD saat ini adalah penerapan strategi optimalisasi aset, karena banyaknya aset yang dimiliki kabupaten namun belum berkontribusi maksimal terhadap pencapaian PAD bahkan ada aset yang dimiliki sejauh ini belum dikelola sama sekali sehingga kontribusi pajaknya nol atau disebut aset mati, dengan upaya tersebut diharapkan semua aset yang dimiliki dapat berkontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD.* (wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di kantor Bappenda Kab.Jayapura)

2. Pelaksanaan/Pemanfaatan secara Efisien & Efektif.

Fokus kedua dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan/ Pemanfaatan secara Efisien & Efektif, yaitu menelaah sejauhmana proses pelaksanaan dalam upaya pencapaian target dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan capaian yang direncanakannya.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mencoba menggali data dan informasi dari sejumlah informan, dan dari Sekretaris Badan diperoleh informasi berkaitan dengan proses Pelaksanaan/Pemanfaatan secara Efisien & Efektif dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, diperoleh informasi sebagai berikut: *“Strategi yang diterapkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Jayapura, yaitu membentuk Tim pengkajian*

STUDIA ADMINISTRASI

aset dari beberapa unsur termasuk keterlibatan pihak internal Bappenda dan para akademisi di wilayah Kabupaten Jayapura untuk melakukan pendataan aset-aset yang berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap pencapaian PAD Kabupaten Jayapura, dimana berdasarkan data aset, terdapat aset kabupaten yang belum dikelola secara maksimal, bahkan diantaranya ada yang belum memberikan kontribusi sedikitpun terhadap PAD tersebut, sementara asetnya dipandang memiliki potensi yang sangat baik apabila dikelola dengan serius. (wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di kantor Bappenda Kab.Jayapura)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara juga dengan Kepala Bidang Program pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dan diperoleh informasi sebagai berikut : *“Strategi pemetaan aset ini merupakan hal yang ditempuh dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Jayapura, pada tahap pelaksanaannya memang memerlukan waktu yang relative lama karena banyak dan tersebarnya aset tersebut pada wilayah kerja kabupaten termasuk pada wilayah-wilayah yang secara geografis relative sulit dijangkau, sehingga perlu melibatkan banyak tim dalam mengimplementasikan strategi ini, sehingga strateginya kita akan memetakan aset secara bertahap mulai pada aset yang ada di wilayah kabupaten dari kabupaten Jayapura sampai ke wilayah lainnya secara keseluruhan.* (wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di kantor Bappenda Kab.Jayapura)

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dan diperoleh informasi sebagai berikut: *“Pelaksanaan optimalisasi aset yang dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan PAD Kabupaten Jayapura, ditempuh dengan memaksimalkan aset atau sumber pendapatan yang sudah ada serta memetakan aset yang belum berkontribusi terhadap PAD dan berdasarkan hasil awal, khusus pada wilayah sekitar kabupaten Jayapura pun ada beberapa aset yang belum berkontribusi terhadap PAD kabupaten Jayapura.* (wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di kantor Bappenda Kabupaten Jayapura)

3. Pengawasan

Fokus terakhir dalam kajian ini adalah mengenai proses pengawasan yang dilakukan, yaitu proses pemeriksaan serta pemantauan yang professional sesuai dengan kapasitas dan kewenangan dari para pelaksana tugas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mencoba menggali data dan informasi dari sejumlah informan, dan dari Sekretaris Badan diperoleh informasi berkaitan dengan proses pengawasan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, diperoleh informasi sebagai berikut: *“Pengawasan dalam pelaksanaan program peningkatan PAD Kabupaten Jayapura ini lebih dioptimalkan terkait pengawasan internal yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan Kepala Badan dengan tugas umum yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian hasil dari pelaksanaan program tersebut yang dilakukan secara berkala guna mengukur progress capaiannya serta menetapkan sejumlah rekomendasi atau perbaikan pada proses pelaksanaannya tersebut.* (wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di kantor Bappenda Kab.Jayapura)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara juga dengan Kepala Bidang Program pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dan diperoleh informasi sebagai berikut : *“Pengawasan yang dilakukan di Bappenda ini tidak semata-*

STUDIA ADMINISTRASI

mata hanya terkait aset dan kontribusinya, tetapi pengawasan dan pengendalian lainnya tetap dijalankan dalam upaya Peningkatan pengawasan di bidang kepegawaian dan cukai serta perbatasan, Kesenambungan reformasi birokrasi, pengawasan pada optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah dan sector lainnya dari seluruh aset yang dimiliki Kabupaten Jayapura. (wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di kantor Bappenda Kab.Jayapura)

Pada kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dan diperoleh informasi sebagai berikut: *“Proses pengawasan yang dilakukan perlu juga melibatkan pihak diluar Bappenda, hal tersebut sudah dijalankan sebagai upaya penerapan prinsip good government terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas public, sehingga proses pengawsan diharapkan berjalan secara riil dan hasilnya disampaikan secara terbuka sehingga sesuai dengan kondisi sebenarnya. (wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di kantor Bappenda Kab.Jayapura)*

B. Pembahasan

1. Perencanaan Yang Tepat

Perencanaan yang ditetapkan Bappenda telah disusun secara efektif dimana sejauh ini Penyusunan rencana kerja yang dilakukan Bappenda mengacu pada hasil kajian mengenai potensi apa yang dapat dikembangkan serta mengacu pada capaian tahun sebelumnya dan dituangkan dalam Renstra Badan, dimana strategi yang diterapkan berdasarkan hal tersebut diantaranya adalah optimalisasi penerimaan pajak, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan optimalisasi penanaman saham pada pihak ketiga, upaya peningkatan kesadaran wajib pajak karena sejauh ini dipandang kesadaran wajib pajak masih relative rendah sehingga dipandang perlu untuk mengoptimalkannya dengan jalan sosialisasi lebih intens melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik termasuk media social, selanjutnya strategi optimalisasi aset, karena banyaknya aset yang dimiliki provinsi namun belum berkontribusi maksimal terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah bahkan ada aset yang dimiliki sejauh ini belum dikelola sama sekali sehingga kontribusi pajaknya nol atau disebut aset mati, dengan upaya tesebut diharapkan semua aset yang dimiliki dapat berkontribusi maksimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Pelaksanaan/Pemanfaatan secara Efisien & Efektif

Strategi yang diterapkan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura yaitu membentuk Tim pengkajian aset dari beberapa unsur termasuk keterlibatan pihak internal Bappenda dan para akademisi diwilayah Jayapura untuk melakukan pendataan aset-aset yang berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap pencapaian PAD Kabupaten Jayapura.

Strtegi pemetaan aset ini merupakan hal yang ditempuh dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Jayapura, pada tahap pelaksanaannya memang memerlukan waktu yang relative lama karena banyak dan tersebarnya aset tersebut pada wilayah kerja kabupaten termasuk pada wilayah-wilayah yang secara geografis relative sulit dijangkau, sehingga perlu melibatkan banyak tim dalam mengimplementasikan strategi ini, sehingga strateginya kita akan memetakan aset secara bertahap mulai pada aset yang ada di wilayah kota kabupaten Jayapura sampai ke wilayah lainnya secara keseluruhan. Pelaksanaan optimalisasi aset yang dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan

STUDIA ADMINISTRASI

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura, ditempuh dengan memaksimalkan aset atau sumber pendapatan yang sudah ada serta memetakan aset yang belum berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Strategi Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dan telah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan adanya peningkatan pajak daerah setiap tahunnya. Program Intensifikasi, yaitu dengan penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pajak serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Pajak. Program ekstensifikasi, melalui pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yaitu melalui kegiatan pendataan dan pengawasan obyek pajak daerah, pengembangan pajak daerah dan menumbuhkan partisipasi wajib pajak melalui sosialisasi ataupun penyuluhan pentingnya pajak serta memberikan penghargaan pada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak.

Faktor-faktor apakah yang mendukung dalam pengelolaan pajak di Kabupaten Jayapura adalah adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai otoritas penuh dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah, dan adanya staf yang cukup memadai, sedangkan faktor yang menghambat adalah kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya staf di lapangan, kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pajak daerah.

3. Pengawasan

Bappenda sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Jayapura, harus menciptakan dan mengidentifikasi berbagai potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pendapatan daerah baru selain SDA. Banyaknya sumber-sumber pendapatan daerah baru yang teridentifikasi, maka secara otomatis terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini secara langsung mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Namun, dalam pengelolaan tersebut bukan hal yang mudah karena banyak sekali faktor penghambat yang muncul, baik dari internal maupun eksternal OPD. Seperti yang diketahui sebagian besar faktor penghambat berasal dari internal OPD, bukan berarti faktor eksternal diabaikan melainkan perlu adanya perbaikan secara internal terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi permasalahan internal Bappenda terutama berdasarkan tugas dan fungsinya. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Bappenda Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan pelayanannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Bappenda dalam penyelenggaraan urusannya adalah masih belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah baik dari sektor pajak, retribusi maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Persoalan ini disebabkan oleh pelayanan yang diberikan belum optimal, pengawasan terhadap pemungutan belum optimal, masih rendahnya kesadaran wajib pajak, dan masih rendah keuntungan dari hasil penanaman saham di pihak ke tiga.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan strategi dalam upaya peningkatan atau optimalisasi Pendapatan asli Daerah Kabupaten Jayapura,

STUDIA ADMINISTRASI

sesuai kondisi yang ada saat ini, maka penetapan strategi tersebut secara khusus untuk mengoptimalkan penerimaan daerah terutama penerimaan sektor lainnya, yaitu belum optimalnya pendapatan dari pihak ketiga sebagai pengelola aset daerah dan aset lainnya yang belum berkontribusi terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Belum optimalnya peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan pembayaran pajak daerah, masih rendahnya kesadaran wajib pajak, belum optimalnya pengelolaan aset-aset daerah, dan belum optimalnya keuntungan dari hasil penanaman saham di pihak ketiga. Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh Bappenda dalam melaksanakan misi tersebut adalah bagaimana menjalankan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan efisiensi serta mengedepankan kemitraan dengan berbagai stakeholders.

Penerapan prinsip pengawasan yang berjalan pada Bappenda Kabupaten Jayapura, dimana Pengawasan dalam pelaksanaan program peningkatan PAD Kabupaten Jayapura ini lebih dioptimalkan terkait pengawasan internal yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan Kepala Badan dengan tugas umum yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian hasil dari pelaksanaan program tersebut yang dilakukan secara berkala guna mengukur progress capaiannya

Pengawasan yang dilakukan di Bappenda ini tidak semata-mata hanya terkait aset dan kontribusinya, tetapi pengawasan dan pengendalian lainnya tetap dijalankan dalam upaya Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, Kesenambungan reformasi birokrasi, pengawasan pada optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah dan sektor lainnya dari seluruh aset yang dimiliki Kabupaten Jayapura. Proses pengawasan yang dilakukan perlu juga melibatkan pihak diluar Bappenda, hal tersebut sudah dijalankan sebagai upaya penerapan prinsip *good government* terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas public, sehingga proses pengawasan diharapkan berjalan secara riil dan hasilnya disampaikan secara terbuka sehingga sesuai dengan kondisi sebenarnya.

KESIMPULAN

Rasionalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jayapura, yang berfokus pada prinsip dasar peningkatan kekayaan aset daerah yakni adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif serta pengawasan (*monitoring*).

Lebih khusus pada strategi penetapan rencana aksi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah yaitu dengan dibentuknya tim pemetaan aset, dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah termasuk pihak eksternal dari luar Bappenda Kabupaten Jayapura. Pada fokus tentang pelaksanaan/Pemanfaatan secara Efisien & Efektif, Strategi ini diterapkan dengan proses pelaksanaan melakukan pendataan atas aset mana yang telah berkontribusi maksimal terhadap PAD, aset mana yang berkontribusi namun masih diluar target dan aset mana yang sejauh ini belum berkontribusi sama sekali terhadap peningkatan PAD. Selanjutnya pada focus Pengawasan, strategi yang ditetapkan, dimana unsur pengawas melibatkan pihak eksternal Bappenda untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi dilakukan dengan adanya sejumlah

STUDIA ADMINISTRASI

rekomendasi dari hasil pengawasan tersebut untuk dijadikan perhatian dan perbaikan pada pelaksanaan program berikutnya, itulah hal-hal yang dipandang rasional dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 1990. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945", *Disertasi*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Deddy Supriady Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Josef Riwu Kaho, 2000, *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung, Armico.
- Lains, Alfian, 1985, *Pendapatan Daerah Dalam Orde Baru*, Prisma, Jakarta.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit: Andi Yogyakarta.
- Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Pancar Suwuh, Jakarta
- Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta, Gramedia Widiasarana,
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.